



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2002 SERI D NOMOR 18

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2002

T E N T A N G

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2001

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2001, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (L.N. Tahun 1956 Nomor 65, T.L.N. Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L.N. Tahun 1997 Nomor 41, T.L.N. Nomor 3685) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (L.N. Tahun 1997 Nomor 44, T.L.N. Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (L.N. Tahun 1999 Nomor 60, T.L.N. Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (L.N. Tahun 1999 Nomor 72, T.L.N. Nomor 3848) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (L.N. Tahun 1997 Nomor 54, T.L.N. Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (L.N. Tahun 1997 Nomor 55, T.L.N. Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (L.N. Tahun 1997 Nomor 56, T.L.N. Nomor 3693) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (L.N. Tahun 2000 Nomor 201, T.L.N. Nomor 4023) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (L.N. Tahun 2000 Nomor 202, T.L.N. Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD ;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001 ;

No.21, 2002

15. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2001 ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 19 September 2001 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2001 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2002 tentang Penetapan Rincian Jumlah Dana Kontinjensi untuk Bantuan kepada Pemerintah Daerah yang mengalami Surplus Marjinal setelah pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) dan Daerah yang membutuhkan Bantuan Perlakuan Khusus ;
29. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 397.314.459.387,91 terdiri atas :

No.21, 2002

a. **PENDAPATAN :**

- Pendapatan Rp. 397.314.459.387,91

b. **BELANJA :**

1. R u t i nRp. 188.874.296.411,83

2. Pengeluaran

Transfer Rp. 53.057.130.742,14

3. Pengeluaran Tidak

Tersangka Rp. 153.259.900,00

4. Pembangunan Rp.109.883.853.799,84

Rp. 351.968.540.853,81

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah berlebih Rp. 45.345.918.534,10

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

No.21, 2002

Ditetapkan di Pontianak.
pada tanggal 23 April 2002


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd.

A. A S W I N.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 21 Tahun 2002 Seri D
Nomor 18 Tanggal

Sekretaris Daerah, Propinsi Kalimantan Barat


Drs. H. Henri Usman, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010054889

advokat-rgsmitra.com
Jln. Kemang Selatan XIIA No.18
Jakarta Selatan 12140 ; rgs@cbn.net.id
Tel.021-75907028 ; sms.08 15.1177.1888